

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte sempat menjadi sorotan masyarakat global akibat dari pernyataan serta sikap dan kebijakannya pada masa kampanye. Beliau dikritik telah melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaan. Kebijakan Presiden Duterte sendiri menjadi pro dan kontra di mata masyarakat Filipina, organisasi non pemerintah, bahkan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama. Dengan banyaknya kritikan bahkan dari dunia internasional Presiden Duterte tetap tidak segan melakukan apa yang dianggapnya terbaik untuk negaranya.

War on Drugs sejatinya tidak hanya milik Filipina, jauh sebelum Filipina, negara-negara Barat seperti Amerika, kemudian Meksiko sudah lebih dulu mendeklarasikan *War on Drugs*. Narkoba adalah masalah serius bagi dunia. Orang tua dari berbagai seluruh penjuru dunia selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang betapa bahayanya narkoba. Publik menganggap pengguna narkoba berpotensi melakukan tindak kriminal serius mulai dari pemerkosaan, perampokan, dan berbagai tindak kriminal mengerikan lainnya tidak terkecuali pembunuhan. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte justru sama atau mungkin jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa dilakukan oleh pemakai, gembong, ataupun pengedar narkoba manapun dari seluruh dunia. *War on Drugs* Filipina membunuh orang-orang tanpa pandang bulu. Hanya perlu satu titik noda narkoba di tubuh seseorang, *Philippine National Police* (PNP) langsung menembak siapapun itu.

Kebijakan kontroversial *War on Drugs* di Filipina ini diumumkan secara langsung oleh presiden Rodrigo Duterte pada masa kampanyenya. Yang lalu ditangani oleh Police Director General Chief, PNP Ronal M Dela Rosa (PNP, 2016) dan menjadi *Command Memorandum Circular No 16 – 2016* tentang PNP *Anti-Illegal Drug Campaign Plan – Project: “Double Barrel”* yang tertanggal 1 Jul 2016 (Leksono, 2018). Rodrigo Duterte bermaksud untuk mengamankan sekaligus menetralsir negaranya dari orang-orang yang diduga terlibat dengan jejaring gembong dan pengedar narkoba. Duterte mengklaim permasalahan utama Filipina adalah gembong dan pengedar narkoba, keberadaan mereka menghambat perekonomian dan kemajuan sosial (Rauhala E. , 2016).

Sebelum tahun 2016, Filipina berada dalam kondisi yang buruk. Saat itu, Filipina dipimpin oleh Benigno Aquino III, seorang politisi populis yang peduli pada rakyatnya dan menjadi harapan perubahan. Selama 6 tahun masa kepemimpinannya Benigno dapat dikatakan tidak melakukan apa-apa terhadap Filipina. Sulit sekali menemukan artikel yang membahas kebijakan maupun kesuksesannya. Salah satu yang menarik hanyalah *wang-wang policy*, kebijakan yang melarang klakson dan sirene pada kendaraan bermotor. Pertumbuhan ekonomi memang mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan Benigno Aquino III. Padahal, apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand, Filipina nyatanya sudah tertinggal jauh. Ditambah permasalahan inkompetensi, korupsi, dan nepotisme yang sudah sejak lama menggerogoti Filipina (Watch, 2015).

Pada tanggal 21 Nopember tahun 2015, Rodrigo Duterte mengumumkan kampanye pencalonan dirinya sebagai presiden tahun 2016. Rodrigo Duterte adalah

seorang Walikota Davao yang lebih dikenal dengan sebutan *'the Death Squad Mayor'*. Dikutip dari the Washington Post:

"Suatu waktu, seorang turis mengabaikan peraturan tidak boleh merokok di sebuah restoran di Davao. Walikota kami langsung datang ke restoran tersebut dengan sebuah pistol dan memaksa si turis memakan puntung rokoknya. Walikota kami berpatroli di jalanan dengan sepeda motor. Walikota kami adalah penyelamat" (Rauhala E. , 2016).

Penuturan dari salah seorang penduduk Kota Davao di atas menggambarkan orang seperti apa Duterte. Namanya dikenal di seluruh negeri sebagai seorang pemburu kriminal. Selama masa jabatannya sebagai Walikota Davao, fenomena *Death Squad* yang beroperasi di wilayah selatan Filipina menggemparkan dunia dan menjadi salah satu subjek yang dilaporkan ke Human Rights Watch. Per tanggal 24 Mei 2016, pada siaran langsung acara *talk show* mingguan, Duterte mengatakan *"Am I the death squad? True. that is true,"* (Kine, 2015). Duterte secara terbuka mengakui hubungan dekatnya dengan *Death Squad* brutal yang telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa kriminal tidak pandang bulu termasuk anak-anak.

Bagi dunia internasional, kebijakan Duterte tentu saja terdengar menyeramkan dan mengerikan. Tapi tidak bagi warga kota Davao yang dulu pernah dipimpinnya. Mia Sultan, seorang pedagang yang bekerja dan tinggal di Davao mengatakan *"Bahkan jika anda tidur di sudut jalan Kota Davao, tidak akan ada orang yang berani menyakiti anda,"*. Mia juga menambahkan bahwa saat berada di Davao ada perasaan aman yang tidak ia dapatkan dibandingkan kota lain. Jika ada yang berani melakukan tindak kriminal atau merokok di sembarang tempat di Kota

Davao, maka ia akan langsung berhadapan dengan *Death Squad*. Itulah sebabnya di sepanjang jalan Kota Davao, tertempel spanduk dan poster yang bertuliskan ucapan terima kasih masyarakat kepada Duterte; Terima kasih sudah membuat kota ini aman dan bebas dari asap rokok (Rauhala E. , 2016).

Duterte mengerti bahwa masyarakat akan terus berpihak padanya sepanjang ia melakukan aksi nyata yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Singkatnya, itulah sebabnya ia menjadikan kampanye “*War on Drugs*” Duterte sebagai kendaraan untuk memenangkan pemilu “Kami tidak akan berhenti sampai gembong dan pengedar narkoba terakhir menyerah atau mendekam di balik jeruji di bawah tanah!,” seru Duterte pada tanggal 25 Juli 2016 di acara pelatikkannya sebagai presiden terpilih Filipina (Iyengar, 2016). Terpilihnya Duterte sebagai Presiden ke-16 Filipina membuat gempar seluruh dunia. Pasalnya, Duterte telah berjanji untuk memerangi gembong dan pengedar narkoba dengan sebuah solusi yang simpel; membunuh mereka.

“Hitler membantai 3 juta Yahudi. Di sini ada sekitar 3 juta orang pecandu narkoba. Saya akan dengan senang hati membantai mereka (pecandu narkoba),” kata Duterte yang dikutip dari CBS News. Lebih lanjut, Duterte memperjelas ancamannya terhadap gembong dan pengedar narkoba dengan mengatakan “Jika anda masih menggunakan obat-obatan terlarang, saya akan membunuh anda. Saya tidak bercanda. Saya tidak sedang ingin membuat anda tertawa. Anak pelacur, saya benar-benar akan membunuh anda.” terang Duterte pada tanggal 4 Juni, 2017 di Kota Davao (Cabico, 2020).

Pendekatan yang diambil Duterte dikritik oleh banyak negara. Presiden Amerika Serikat ditahun 2016, Barrack Obama mengatakan ia berencana mengangkat isu hak asasi manusia pada rencana kunjungannya ke Filipina

pada bulan September. Menanggapi rencana tersebut, Presiden Duterte merespon dengan berapi-api dan menyebut Presiden Obama “Anak pelacur.”. Presiden Obama lalu membatalkan rencana kunjungan tersebut, ia juga menambahkan bahwa pendekatan yang diambil Presiden Duterte dapat menyebabkan banyak orang-orang tidak bersalah terluka apabila kebijakan tersebut dilaksanakan dengan cara yang salah (Placido, 2016).

Kritik paling keras didengungkan oleh Human Rights Watch, sampai saat tulisan ini dibuat, setiap tahunnya Human Rights Watch tidak henti-hentinya membuat artikel tentang *War on Drugs* yang tengah berlangsung demi meningkatkan kesadaran publik internasional terhadap *extrajudicial killing* yang dilakukan pemerintah Filipina. Human Rights Watch bahkan membuat laporan pada tahun 2017 dengan judul *License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte's "War on Drugs"*. Organisasi-organisasi non pemerintah, mulai dari kelompok agama hingga kelompok advokat HAM menentang keras kebijakan Duterte. Mereka mendesak agar Filipina menghentikan pembunuhan-pembunuhan yang disetujui negara atas dasar hukum.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Filipina meminta pemerintah administratif Duterte untuk menghentikan kebijakan *War on Drugs*. Kelompok aktivis HAM bernama Free Legal Assistance Group (FLAG) membuat petisi 41 halaman yang mereka usulkan ke pengadilan tinggi. Isi petisi tersebut salah satunya adalah tuntutan kepada pengadilan tinggi untuk mengeluarkan Perintah Penahanan Sementara/*Temporary Restraining Order* (TRO) terhadap operasi *Oplan Double Barrel* milik kepolisian Filipina atau Philippine National Police (PNP) (Punay, 2017).

Tuntutan diusulkan atas dasar pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk diproses melalui hukum, dan hak

untuk dianggap tidak bersalah atau bersalah oleh pengadilan yang adil. Menyusul tuntutan tersebut, operasi *Oplan Double Barrel* sempat dibekukan. Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) kemudian mengambil peran PNP dalam *War on Drugs* sebelum akhirnya pada tahun 2018, PNP melanjutkan kembali operasi mereka, kali ini sebagai peran pendukung bagi PDEA (Cahiles, 2017).

Menanggapi berbagai kritikan dan tuduhan kepadanya. Juru bicara presiden, Salvador Panelo, mengatakan bahwa “Pemerintah tidak ingin membunuh, itu bukan niat kami”. Walaupun nyatanya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang dilakukan dan ditiadakan Duterte selama ini pada saat kampanye kepresidenannya (Giles, 2019). Sebaliknya, kalau Duterte yang berbicara langsung, ia selalu merespon dengan vulgar, mengatakan kepada semua pihak yang mengkritiknya sekaligus memperingatkan para gembong dan pengedar narkoba bahwa ia tidak akan berhenti, ia akan terus membunuh orang-orang yang terlibat dengan obat-obatan terlarang, dan ia tidak akan pernah merasa bersalah karena menegakkan keadilan. Pada bulan Agustus tahun 2018, Duterte menginstruksikan kepada PNP untuk menyerang siapa saja yang menghalangi maupun menentang kebijakan *War on Drugs* termasuk kelompok aktivis HAM dan kelompok advokat HAM.

Permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran obat-obatan terlarang atau narkoba memang merupakan salah satu masalah serius di Filipina. Narkoba yang sering disalahgunakan di Filipina adalah jenis metamfetamin dengan nama sabu-sabu. Mengacu pada laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) pada tahun 2012, Filipina merupakan negara dengan rata-rata tingkat penyalahgunaan metamfetamin tertinggi di antara negara-negara Asia Timur-Asia Tenggara (UNODC, 2012).

Sampai, 2019, pemerintah Filipina mengklaim sudah berhasil ‘menetralisir’ 5.552 orang yang terbukti menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Tetapi, menurut laporan Human Rights Group, diperkirakan tidak kurang dari 27.000 orang ‘yang terkait’ dengan narkoba terbunuh dalam operasi *War on Drugs* yang dijalankan PNP (Cabico, 2020). Jika ditarik kembali ke cita-cita awal kebijakan ini muncul, yaitu untuk melindungi dan mengamankan Filipina dari ancaman bahaya narkoba, maka statistik angka pembunuhan tanpa proses hukum di atas bisa jadi justru malah menyebarkan rasa takut bagi masyarakat.

Melihat permasalahan tersebut, menarik bagi penulis untuk bagaimana Presiden Rodrigo Duterte meyakini berbagai kritik dari dunia internasional terhadapnya dalam upayanya untuk membuat Filipina yang aman, damai, dan bebas dari berbagai macam tindak kriminal, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu: **Mengapa Presiden Rodrigo Duterte tetap menjalankan kebijakan War On Drugs meski mendapatkan kritik internasional?**

C. Kerangka Pemikiran

Presiden Duterte telah dianggap melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaan melalui kebijakan barunya yang di sebutkan saat masa kampanye. Berikut adalah konsep-konsep yang digunakan untuk memahami alasan Presiden Duterte tetap menjalankan kebijakannya meski mendapat kritik internasional, yaitu:

1. Konsep Kedaulatan

Kedaulatan sangatlah penting bagi suatu negara, Doktrin Westphalian menganut prinsip penghormatan

atas kedaulatan suatu negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri suatu bangsa, (Mukti, 2013). Adapun menurut Miriam Budiardjo, unsur-unsur negara yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Tanpa adanya kedaulatan suatu negara akan mudah diintervensi dari luar dan mengganggu struktur pemerintah domestik (Budiardjo, 2008). Maka dari itu kedaulatan sangatlah penting bagi suatu negara, dan seorang pemimpin negara haruslah bisa melindungi kedaulatan negaranya agar tidak kehilangan kemerdekaan dan menjadi negara terjajah.

Kedaulatan (*Sovereignty*) berasal dari kata latin *Superanus* yang berarti teratas. Dapat dikatakan negara yang berdaulat yaitu negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Mochtar Kusumaatmadja beranggapan bahwa Hukum Internasional tidak dapat mengikat suatu negara apabila negara itu merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya atau memonopoli kekuasaan (Kusumaatmadja, 2003).

Teori kedaulatan merupakan hukum yang menyebutkan bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam mengatur urusan negaranya, juga membuat negara lain tidak berhak mencampuri urusan negara lain kecuali masalah tersebut berdampak besar bagi kestabilan internasional yang mana negara memiliki kewenangan dalam berhubungan dengan actor lain dan bebas memilih dengan siapa ingin bekerja sama tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari negara lain (Kusumaatmadja, 2003).

Kedaulatan juga merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Suatu negara mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati peraturan dan perundangan

negara tersebut, yang biasa disebut (*Internal Sovereignty*). Selain itu negara juga dapat menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya demi mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari luar dan mempertahankan kedaulatan keluar atau (*External Sovereignty*). Sebuah negara juga mempunyai sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati. Sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal dengan menggunakan sarana polisi, tentara dan sebagainya. Namun dalam negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hanya dipakai seminial mungkin (Budiardjo, 2008).

Dalam kasus kebijakan Presiden Rodrigo Duterte: War on Drugs yang kontroversial ini, Filipina sebagai negara berdaulat dan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kebutuhan negara dan apa yang terbaik untuk negaranya. Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina yang memiliki kekuasaan dan otoritas tertinggi bertanggung jawab untuk melindungi negara dan warganya. Masalah narkoba yang sudah mengakar di Filipina menjadi pusat perhatian Duterte. Duterte beserta pemerintahannya membuat sebuah kebijakan untuk menyelesaikan semua masalah narkoba serta memberantas gembong narkoba demi melindungi negara dan rakyatnya. Pentingnya peran kedaulatan bagi suatu negara membuat Presiden Duterte memutuskan untuk mengabaikan kritik dan kecaman dari para aktor internasional dan tetap melanjutkan prioritas utamanya untuk memberantas narkoba dengan kebijakan War on Drugsnya.

Di dalam isu HAM Presiden Duterte menggunakan prinsip Hobbesian model yang melindungi kedaulatan negara karena menjadi bagian dari kedaulatan. Teori Hobbesian mendorong bahwa

negara itu berdaulat dan tidak bisa diatur oleh negara lain atau norma internasional. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut “*jus cogens*” atau “*peremptory norms*”, yaitu: suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar (Santoso, 2018).

2. Konsep Kepentingan Nasional (National Interest)

Dalam kepentingan nasional, negara berperan sebagai aktor yang dapat mengambil keputusan dan menjadi peran penting dalam pergaulan internasional. Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk dan cara hidup masyarakatnya yang khas. Tanpa adanya negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan dan pelindung keamanan, maka kehidupan masyarakat akan menjadi sulit dan penuh ketakutan (Jackson & Sorensen, 2009).

Menurut Hans. J Morgenthau, kepentingan nasional merupakan dasar untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara. kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain (Mas'ood, 1990).

Sedangkan kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta

faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1982). Ini berarti bahwa politik luar negeri merupakan kelangsungan hidup, keamanan, ekonomi, maupun politik suatu bangsa.

Dengan demikian kepentingan nasional suatu negara muncul akibat terbatasnya sumber daya nasional atau kekuasaan nasional, sehingga negara merasa perlu untuk melakukan pemenuhan kepentingan nasionalnya. Tindakan yang diambil oleh pemimpin politik terhadap masalah-masalah domestik maupun internasional dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara mereka sendiri. Setiap negara pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memajukan negaranya melalui kepentingan tersebut.

Di negara Filipina, masalah tentang narkoba sudah sangat meresahkan dan mengancam negara, menyebabkan Presiden Duterte dan pemerintahan pun setuju untuk membuat kebijakan War On Drugs tersebut. Sumber pembuatan kebijakan tersebut tertera pada Command Memorandum Circular NO. 16 – 2016 tentang PNP Anti-Ilegal Drugs Campaign Plan - Project: "DOUBLE BARREL" antara lain Peraturan Dewan Obat Berbahaya (DDB) No. 2, Seri 2007, Panduan yang Direvisi dalam Pelaksanaan Kliring Obat Barangay Operasi tanggal 6 Juni 2007, Perintah Eksekutif No. 218 (Memperkuat Mekanisme Dukungan kepada PDEA) tanggal 18 Juni 2003 dan Republic Act

9165 atau dikenal sebagai Comprehensive Dangerous Undang-Undang Narkoba 2002 tertanggal 7 Juni 2002.

Command Memorandum Circular tersebut menetapkan pedoman umum, prosedur dan kantor polisi dalam pelaksanaan Rencana Kampanye Anti Narkoba Polri (PNP) - PROYEK: "DOUBLE BARREL" dalam mendukung Strategi Kliring Obat Barangay dari pemerintah dan netralisasi tokoh-tokoh obat terlarang secara nasional demi terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan meningkatkan keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat.

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, maka hipotesa yang timbul yaitu Presiden Duterte tetap melanjutkan kebijakan War On Drugs meskipun mendapat kritik internasional karena Presiden Duterte memandang isu hak asasi manusia (HAM) adalah urusan domestik Filipina dan sesuai dengan prinsip *hobbesian*. Dengan alasan tersebut, Presiden Duterte beserta pemerintah Filipina memilih untuk menghiraukan kritik internasional dan tetap menjalankan kebijakan War On Drugs tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu alasan Presiden Rodrigo Duterte tetap menjalankan kebijakan War On Drugs meski mendapat kritik dari dunia internasional dalam upayanya untuk membuat Filipina yang aman, damai, dan bebas dari berbagai macam tindak kriminal, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba.

F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah metode deskripsi-analitic, dengan mengumpulkan data dan fakta lalu disusun secara sistematis berdasarkan kerangka konseptual. Penulis

mengumpulkan data dan sumber referensi dari buku-buku, artikel, jurnal dan web berita.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jangka waktu penelitian sejak tahun 2016 yaitu pada tahun terpilihnya Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden, hingga tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menyediakan 4 bab yang terdiri dari:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II akan membahas tentang upaya yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte dan pemerintah Filipina dalam pemberantasan narkoba.

Bab III akan membahas tentang kritik internasionalnya dan alasan mengapa Presiden Duterte tetap menjalankan kebijakan War On Drugs meski mendapat kritik internasional.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan.